

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA
BETUNG KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN
PELALAWAN

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



ROBI JUPRI ADI
NPM : 167110424

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konfrehensif (Skripsi) yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Robi Jupri Adi
NPM : 167110424
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan;

1. Bahwa, naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Desember 2021

Selaku Pernyataan

Robi Jupri Adi

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA
BETUNG KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN
PELALAWAN**

ABSTRAK

Robi Jupri Adi (167110424)

Pemerintahan Desa Betung telah melakukan pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Betung telah melaksanakan berbagai program pembangunan Desa Betung. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kondisi suatu fisik daerah tentang fasilitas yang disediakan oleh pemerintahan Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, untuk mengetahui factor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif maka dilakukan dengan wawancara dan penyebaran kuesioner dan pengamatan secara langsung, kurangnya keterbukaan Pemerintah Desa Betung terhadap masyarakat sehingga banyak dari masyarakat yang tidak tahu program apa saja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan sumber daya yang kurang baik sehingga pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa kurang optimal kemudian faktor pendukungnya adalah diberikan kebebasan berpartisipasi dan dukungan finansial dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa berhasil dan terlaksana sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pembangunan, Infrastruktur

**IMPLEMENTATION OF VILLAGE INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT IN BETUNG VILLAGE, PANGKALAN KURAS
DISTRICT PELALAWAN REGENCY**

ABSTRACT

Robi Jupri Adi (167110424)

The Betung Village Government has implemented Village Infrastructure Development. Implementation of Infrastructure Development carried out by the Betung Village Government has implemented various Betung Village development programs. Community welfare can be seen from the physical condition of the area regarding the facilities provided by the village government. The purpose of this study was to find out how the implementation of village infrastructure development in Betung village, Pangkalan Kuras district, Pelalawan district, to find out the factors that became an obstacle in the implementation of village infrastructure development in Betung village, Pangkalan Kuras district, Pelalawan district. This research uses quantitative research methods, it is carried out by interviewing and distributing questionnaires and direct observations, the lack of openness of the Betung Village Government to the community so that many of the people do not know what programs have been implemented by the Village Government and poor resources so that the implementation of development Village infrastructure is less than optimal then the supporting factors are being given the freedom to participate and financial support in the successful implementation of village infrastructure development and carried out according to what is needed by the community.

Keywords: Implementation, Development, Infrastructure

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul: **Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.** tanpa halangan suatu apapun.

Walapaun demikian penulis menyadari pada lembar tertentu dari usulan penelitian ini mungkin di temukan berbagai kesalahan dan kekeurangan. Untuk memenuhi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pegantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis samapaikan kepada:

1. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M. C. L. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Islam Riau.
2. Terima kasih kepada Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, semoga di tangan Bapak lahir kader-kader yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
3. Terima kasih kepada Ibu Lilis Suriyani, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi di jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

4. Terima kasih kepada Ibu Dia Meirina Suri, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Pengasuh Akademik (PA) yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Terima kasih kepada Seluruh Dosen Administrasi Publik dan juga staf TU yang telah mendidik serta mengajarkan kepada penulis baik dilingkungan dan maupun diluar lingkungan kampus..
6. Terkhusus dan teristimewa penulis persembahkan ucapan terima kasih yang tak terhingga Kepada kedua orang tua Ayahnda dan Ibunda tercinta serta Kakak tersayang Santi Kartika Putri, Abang Ipar, kawan-kawan Pemuda Desa Betung, dan kawan-kawan seperjuangan yang selalu memberikan do'a, dorongan secara moril dan materil kepada penulis dan juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa sekali kepada penulis dalam melaksanakan studi. Penulis bermohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu di balas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup kepada para pembaca.

Pekanbaru, 02 Desember 2021

Robi Jupri Adi



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ivii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1. tujuan penelitian.....	12
2. kegunaan Penelitian	12
BAB II	13
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	13
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Administrasi Publik	13
2. Konsep Organisasi Publik.....	15
3. Konsep Manajemen Publik	18
4. Konsep Pembangunan Nasional.....	22
5. Konsep Pembangunan Daerah dan Pedesaan.....	24
B. Kerangka Berpikir	26
C. Konsep Operasional	27
D. Operasional Variabel.....	29
E. Teknik Pengukuran.....	30

BAB III	32
METODE PENELITIAN	32
A. Tipe Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Populasi dan Sampel.....	33
D. Teknik Penarikan Sampel.....	33
E. Jenis Dan Sumber Data.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	35
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	36
BAB IV	37
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37
B. Sejarah Singkat Desa.....	37
C. Visi Desa Betung.....	39
D. Misi Desa Betung.....	39
E. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Betung.....	41
BAB V	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Identitas Responden.....	43
1. Identitas Respondend Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
2. Identitas Respondend Berdasarkan Usia.....	45
3. Identitas Respondend Berdasarkan Pendidikan.....	46
B. Hasil dan Pembahasan Dari Indikator Variabel.....	48
1. Perencanaan.....	49
2. Pengarahan.....	51
3. Pelaksanaan.....	53
4. Pengawasan.....	56
C. Faktor-Faktor Penghambat.....	59
BAB VI	61
PENUTUP	61

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	66
DOKUMENTASI PENELITIAN.....	90



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1	Data Program Pembangunan Berdasarkan Tahun 2019.....6
II.1	Operasional Variabel Penelitian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....35
III.1	Populasi dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....39
III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....42
IV.1	Data Perangkat Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....48
V.1	Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin Pegawai Kantor Desa Betung Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....50
V.2	Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin Masyarakat Desa Betung Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....50
V.3	Identitas Responden Menurut Usia Pegawai Kantor Desa Betung Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....51
V.4	Identitas Responden Menurut Usia Masyarakat Desa Betung Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....52
V.5	Identitas Responden Menurut Jenjang Pendidikan Pegawai Kantor Desa Betung Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....53

V.6	Identitas Responden Menurut Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	53
V.7	Tanggapan Responden Pegawai Kantor Desa Betung Terhadap Perencanaan.....	55
V.8	Tanggapan Responden Masyarakat Desa Betung Terhadap Perencanaan.....	56
V.9	Tanggapan Responden Pegawai Kantor Desa Betung Terhadap Pengarahan.....	57
V.10	Tanggapan Responden Masyarakat Desa Betung Terhadap Pengarahan.....	58
V.11	Tanggapan Responden Pegawai Kantor Desa Betung Terhadap Pelaksanaan.....	60
V.12	Tanggapan Responden Masyarakat Desa Betung Terhadap Pelaksanaan.....	61
V.13	Tanggapan Responden Pegawai Kantor Desa Betung Terhadap Pengawasan.....	62
V.14	Tanggapan Responden Masyarakat Desa Betung Terhadap Pengawasan.....	63
V.15	Rekavitulasi Penilaian.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	32
IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Betung Kecamatan pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	47



LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuesioner Pegawai Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	74
2. Daftar Kuesioner Masyarakat.....	84
3. Daftar Wawancara Kepala Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	90
4. Daftar Telly Penelitian.....	92
5. Dokumentasi Penelitian.....	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah sebuah organisasi yang didalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas negara merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional (berdasarkan Undang-Undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama. Berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Indonesia.

Negara adalah suatu bentuk organisasi dan sebagai suatu negara yang sedang berkembang, Negara Indonesia sedang giat-giatnya dalam melaksanakan pembangunan di dalam segala sektor, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, pembangunan nasional ini di titik beratkan pada bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan bidang lainnya, yang menjadi prioritas adalah pembangunan. Dan salah satu tujuan pembangunan Negara adalah kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan dalam pembangunan Indonesia. Hal ini juga terdapat dalam Undang-undang 1945 alenia ke-4 yang berbunyi “mensejahterakan kehidupan bangsa”, dan untuk mendukung dari tujuan Negara. Dalam pelaksanaan proses administrasi pada suatu desa sebagai bentuk organisasi pemerintah yang terendah,

pemerintah tersebut guna mencapai tujuan dari pembangunan Desa. Tentunya dalam hal ini ada pemerintah sebagai penggerak dari pelaksanaan pembangunan Desa yang dibantu oleh perangkat Desa setempat. Dalam hal ini sudah terlihat dengan jelas bahwa Desa merupakan suatu organisasi dimana dalam pelaksanaan aktivitasnya memerlukan proses administrasi.

Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisme tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukanse sebelumnya. Seiring dengan itu Hodkidson (dalam Kusdi:2011) mendefinisikan administrasi adalah aspek-aspek yang lebih banyak berurusan dengan formalitas, tujuan, masalah terkait nilai, dan komponen manusia dalam organisasi.

Dalam melaksanakan proses administrasi pada suatu desa sebagai bentuk organisasi pemerintah yang rendah, yang mana sudah tentu mempunyai orang-orang yang menjalankan aktivitas pelayanan masyarakat dalam lembaga pemerintahan tersebut guna mencapai tujuan dari pembangunan desa yang dibantu perangkat desa setempat. Dalam hal ini sudah terlihat dengan jelas bahwa desa merupakan suatu organisasi dimana dalam pelaksanaan aktivitasnya memerlukan proses administrasi. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Tahun 2014 tentang pemerintah desa, dimana desa diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi desa) seluas-luasnya dalam rangka percepatan pembangunan, dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan dan berbagai kegiatan pembangunan yang ada dalam desa saat ini.

Hal utama yang mendesak diperlukan desa adalah bagaimana memutus mata rantai sumber daya manusia yang tidak berdaya dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan kata lain, pemberian jawab yang besar dengan sejumlah anggaran yang sangat besar tidak akan pernah memberikan hasil optimal jika sumber daya manusia atau cara pandang aparatur pemerintahan desa tidak pernah ditingkatkan. Pada titik ini, peran kepala desa, tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dan partisipasi masyarakat dipandang sangat penting keberadaannya dalam upaya memutus persoalan-persoalan yang terjadi di desa, seperti kurang mantapnya tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa dalam mencapai tujuan pemerintah secara baik, dengan memfungsikan tugas lembaga penyelenggara pemerintahan desa secara maksimal. Di dalam wujud sistim pemerintahan desa yang baik pemerintahan desa mempunyai tugas yang serius dalam menjalankan roda pemerintahan desa, baik dalam administrasi, pengawasan dan evaluasi dalam melaksanakan system pemerintahan di dalam mewujudkan pemerintahan desa yang professional.

Jika desa tidak dikelola dengan baik tentu akan banyak terdapat masalah yang terjadi dalam proses pemerintahan, oleh karena itu peran kepala desa, tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa, dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan dan mengawasi serta memberikan masukan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat mempengaruhi tercapainya sistem pemerintahan desa yang baik dan benar. Fungsi strategis pengelolaan dana desa terletak pada Kepala Desa karena kepala desa merupakan pemegang kekuasaan

pengelolaan dana desa sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 pasal 93 ayat 1,2 dan 3 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Pengelolaan Keuangan Desa meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban).
2. Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Penyelenggara pemerintahan desa merupakan upaya pemerintah desa didalam memberikan pelayanan, pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui pelatihan dan pengawasan kepada aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan sistem pelaksanaan dan pengelolaan pemerintah desa yang baik. Kedudukan kepala desa, sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang diberi kewenangan menjalankan pemerintahan umum, seperti percepatan pembangunan melalui penyediaan sarana-prasarana, dan upaya percepatan pembangunan ekonomi desa yang kokoh dan mandiri.

Sebagai salah satu entitas penting pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, desa merupakan ujung tombak pembangunan karena kedekatannya dengan masyarakat serta ruang lingkup administrasinya yang sempit. Desa sebagai bagian integral dari pemerintahan di satu sisi dan juga di sisi lain, memiliki peran sebagai pelindung entitas lokal, maka sudah sepatutnyalah desa dikelola sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum serta mengedepankan asas manfaat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat, usaha ekonomi dan pendidikan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan mengembangkan wirausaha, serta perluasan ekonomi individu melalui pengadaan atau bantuan permodalan. Atau bahkan dalam menentukan prioritas dalam penggunaan dana desa disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa.

Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa apabila kepala desa dalam pembuatan laporan penggunaan dana desa terlambat disampaikan. Apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa,

Sebagai salah satu entitas penting pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, desa merupakan ujung tombak pembangunan kerana pendekatannya dengan masyarakat serta ruang lingkup administrasinya yang sempit. Desa sebagai bagian integral dari pemerintahan disatu sisi dan juga pada sisi lain, memiliki peran sebagai pelindung entitas lokal, maka sudah

sepatutnya desa dikelola sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum serta mengedepankan asas manfaat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Kenyataan yang dihadapi pemerintahan desa pada saat ini sebenarnya tidak hanya terletak pada kemampuan anggaran yang dimiliki untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Sumber dari segala persoalan ini adalah minninya sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menjalankan roda pemerintahan desa yang sesuai asas-asas pemerintahan umum.

Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, kehidupan masyarakat serta untuk mendukung tugas dari aparaturnya pelaksana pelayanan publik.

Tabel 1.1 :Data Program Pembangunan Berdasarkan Tahun 2019

No	Program Pembangunan	Dana Desa	Terlaksana	Tidak Terlaksana
1.	Bidang Pendidikan (PAUD,TK,TPA,TPQ,Ma drasah NonFormal)	237.474.200.00	√	
2.	Bidang Kesehatan(Posyandu, (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lamsia, Insentif)	284.403.300.00	√	
3.	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Pembangunan	97.476.800.00	√	

	rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalan Lingkungan)			
4.	Pembangunan Rehabilitasi peningkatan Pengadaan sarana Dan Prasarana	269.403.300.00	√	
5.	Bidang kawasan Pemukiman (Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan sumber Air Bersih Milik Desa)	343.609.400.00	√	
6.	Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman	212.274.200.00		√

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Dari table diatas dapat kita ketahui bahwa yang dibangun oleh pemerintah desa sudah terlaksanakan sebagian, namun dari pembangunan tersebut masih banyak masyarakat yang belum merasakan pembangunannya.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa pada saat ini masih menyimpang dari eksptasi masyarakat desa karena masih banyaknya pembangunan yang bermanfaat dan berguna banyak masyarakat belum terlaksana

dengan baik, adapun pembangunannya yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan adalah salah satu akses aktivitas untuk sehari-hari oleh masyarakat petani, nelayan dan akses untuk pendidikan.
2. Pos keamanan desa, yang mana Pos keamanan desa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa demi kenyamanan dan ketentraman desa.
3. Gedung Olahraga yang kurang memadai dan tidak adanya perhatian dari desa setelah dibangun.

Dari keterangan masyarakat diatas dapat kita simpulkan kurangnya perhatian desa terhadap kenyamanan dan ketentraman masyarakat dalam segi pembangunan terutama pada akses jalan. Yang mana pada akses jalan ini masih banyaknya belum terealisasi mengakibatkan akses aktivitas sehari-hari masyarakat terganggu, mengapa dikatakan terganggu karena jalan tersebut masih banyak yang rusak mengakibatkan terjadinya kecelakaan apalagi pada saat hari hujan.

Menurut S.P. Siagian, (2006 : 12) pembangunan merupakan suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan atau perubahan yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah dari pebangunan dalam rangka pembinaan bangsa. Pendapat diatas menjelaskan pembangunan merupakan suatu usaha perubahan kearah kehidupan yang layak dan lebuah baik yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa secara adil dan merata.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan

pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Lebih lanjut dijelaskan, pembangunan partisipatif adalah suatu system pengelolaan pembangunan di desa dan kawassan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongrayongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan social.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, yaitu meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan penjabarab dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Dalam segala hal kepala desa perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat, ketelitian, keseriusan, dan ketegasan dalam mengambil kebijakan agar setiap kebijakan pembangunan desa yang diambil terencana dan tepat sasaran. Dalam melakukan segala usaha guna tercapainya tujuan tersebut kepala desa haruslah membuat atau membangun dukungan masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. (Edi Suharto, 2005:80)

Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, kehidupan masyarakat serta untuk mendukung tugas dari aparaturnya pelaksanaan pelayanan public. Negara menyediakan dana desa bagi pemerintahan desa, dana desa tersebut ditujukan untuk tiga aspek, yaitu;

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa yaitu: tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, lingkungan permukiman masyarakat desa, infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.

2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pembinaan kelembaga kemasyarakata, penyelenggara ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan

prasarana olah raga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan kegiatan lain sesuai kondisi desa.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelatihan usaha ekonomi, pertanian perikanan dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, peningkatan kapasitas masyarakat, yaitu; kader pemberdayaan masyarakat desa; kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhatin dan pelindung anak, kelompok pemuda, dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

Dari tiga aspek tersebut ada beberapa aspek anggaran pembangunan yang belum terlaksana dengan baik, di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras berdasarkan fenomena yang penulis lihat:

1. Pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pembangunan tersebut tidak menghasilkan dampak yang baik oleh masyarakat setempat.
2. Belum maksimalnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Betung, sehingga banyak dari program pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Dari fenomena diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
 - b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
2. Adapun kegunaan Penelitian dalam penelitian ini adalah:
 - a. Kegunaan Teoritis diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan umumnya bagi pengembangan bidang Ilmu Administrasi publik.
 - b. Kegunaan Akademis diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
 - c. Kegunaan Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan sebagai dasar pertimbangan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi Publik

Menurut siagian (2007;5) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan – keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Menurut Syafri(2012;5) administrasi yakni (rangkaiannya) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dari batasan tersebut oleh syafri diatas dapat diinterpretasikan bahwa administrasi merupakan suatu proses dari rangkaian mencapai tujuan tertentu dengan tidak mengesampingkan sumberdaya yang digunakan.

Administrasi menurut Brooks Adams (dalam Wirma Syafri 2012;8) Adalah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lainnya didalam satu organisasi sedemikian padunya sehingga kekuatan –kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan .Dari batasan diatas diketemukan ide pokok sebagai berikut :

- a) Administrasi adalah kemampuan untuk memadukan kekuatan-kekuatan sosial di dalam suatu organisasi.
- b) Kekuatan itu di padukan dengan maksud agar setiap kekuatan yang ada bergerak sebagai satu kesatuan /keseluruhan organisasi.

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya (Yussa & Hendry Andry 2015;1011)

Menurut (Yussa & Hedry Andry 2015;11)Administrasi memiliki beberapa unsur yang karena adanya unsur ini menjadikan administrasi itu ada.

Adapun unsur- unsur administrasi dimasud adalah sebagai berikut:

- 1) Dua orang atau lebih
- 2) Tujuan
- 3) Tugas yang hendak dilaksanakan
- 4) Peralatan dan perlengkapan

Administrasi menurut Dwight Aldo(2012;10)adalah tindakan yang di perhitungkan dengan cermat untuk merealisasikan tujuan tertentu yang di kehendaki dengan kehendaki dengan kerugian /pengorbanan yang minimal untuk mewujudkan tujuan lain yang di kehendaki .Dari pengertian diatas ide pokok menurut waldo sebagai berikut;

1. Administrasi adalah kegiatan
2. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka kerja sama sekelompok orang
3. Rangkaian kerja itu dilakukan secara efisien
4. Rangkaian kegiatan kerja sama yang efisien itu dilakukan untuk mencapai tujuan yg dikehendaki

Administrasi menurut Zulkifli (2009;8)adalah mencakup keseluruhan proses aktifitas kerja sama sejumlah manusia dalam organisasi untuk mencapai suatu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Administrasi

merupakan rangkaian kegiatan penata pekerjaan yang dilaksanakan bersama untuk mencapai tujuan yang di inginkan bersama.

Administrasi menurut Chester I. Bernard (dalam Sufian Hamim 2005;8) adalah suatu sistem tentang aktivitas kerja sama dari dua orang atau lebih sesuatu yang tidak berujud dan tidak bersifat pribadi.

Menurut The Ling Gie (dalam Pasolong 2013;3) mendefinisikan administrasi adalah merangkai kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang didalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Dari batasan yg dikemukakan oleh The Ling Gie diatas dapat di interpretasikan bahwa administrasi tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaan oleh beberapa orang yang bekerja sama mencapai tujuan

Jadi dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama kelompok orang dalam wadah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

2. Konsep Organisasi Publik

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembedaan tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan.

H.B Siswanto (2013;73) organisasi didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Dalam suatu organisasi mengandung 3 elemen, yaitu:

1. Sekelompok orang
2. Interaksi dan kerja sama, serta
3. Tujuan bersama.

Richard Scott(dalam Miftah Thoha 2011;35)organisasi adalah sebagai kesatuan rasional dalam upaya untuk mengejar tujuan, sebagai kualisi pendukung yng kuat dimana organisasi merpakan instrumen untuk mengejar kepentingan masing-masing, sebagai suatu sistim terbuka dimana kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung imput dari lingkungan,sebagai alat dominasi dan banyak lagi perspektif yang dapat dipakai untuk memaknai organisasi.

James D.Mooney mengatakan organisasi yaitu bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama .Organisasi menurut Chaster I.Barnad adalah suatu sistem kegiatan yang diarah kan pada tujuan yang hendak dicapai,fungsi utama manajemen yaitu perumusan tujuan pengadaan sumber daya yang di perlukan untuk mencapai tujuan (dalam Zulkifli &Nurmasari 2015;41).

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Siagian(dalam Yussa & Hendry Andry 2015;14)

Menurut John D .millet (Inu Kenana 2003;113) Organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Menurut Siagian (dalam Yussa & Hendry Andry 2015;14) Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua oarang atau lebih yang berkerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut bawahan.

Dwight aldo (Inu Kenana 2003;114) mendefenisikan organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan –kewenangan dan kombinasi –kombinasi dalam hubungan antar orang – orang pada sistem administrasi.

Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan , pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu ,pendelegasian wewenang ,pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas.Defenisi organisasi menurut pendekatan proses pendapat massie (dalam Zulkifli & Moris A Yogia 2014;20)yaitu organisasi merupakan suatu kerja sama sekelompok orang yang membagi tugas –tugas nya diantara para anggota ,menetapkan hubungan – hubungan kerja dan menyatukan aktifitas –aktifitas nya kearah pencapaian tujuan bersama.

Menurut Siagian (2007;141) dalam suatu negara administrasi, pemerintah dengan seluruh jajarannya bisa dikenal sebagai abdi masyarakat, dalam bahasa yang sederhana peran tersebut dapat diharapkan terwujud dalam pemberian berbagai jenis pelayanan yang di perlukan oleh seluruh warga masyarakat.

Organisasi adalah suatu sistim perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang berrkerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Hasibuan 2002;5).

Richard Scott (dalam Miftah Thoha 2011;35) organisasi adalah sebagai kesatuan rasional dalam upaya untuk mengejar tujuan, sebagai kualisi pendukung yang kuat dimana organisasi merupakan instrumen untuk mengejar kepentingan masing-masing, sebagai suatu sistim terbuka dimana kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung imput dari lingkungan,sebagai alat dominasi dan banyak lagi perspektif yang dapat dipakai untuk memaknai organisasi.

Berdasarkan penentuan organisasi tersebut disimpulkan bahwa organisasi merupakan kesimpulan orang yg berkerja sama dengan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam sistem koordinasi dan pengaturan guna mendahulukan pencapaian beberapa tujuan yang telah ditetapkan.

3. Konsep Manajemen Publik

Manajemen menurut Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard (dalam Siswanto, 2013; 2) sebagai salah satu usaha yang dilakukan dengan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen menurut Siswanto dan Doni (2014;16) manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu: Men, Money, Methode, Material, Machine, dan Market.

Menurut Goerge R. Terry dan Leslie (dalam Karyoto, 2016;3) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang dilibatkan bimbingan atau pengarahan terhadap suatu kelompok orang kearah tujuan organisasi atau maksud – maksud nya yang nyata. Artinya bimbingan perlu diberikan karena tidak semua pekerjaan terampil dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Cara yang digunakan untuk membimbing tentu bergantung kepada kebijakan dan kegiatan pimpinan, misalnya kepada pekerja yang kurang terampil dapat diberi pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya.

Selanjutnya menurut Malayu Hasibuan (2014; 2) mengatakan manajemen adalah ilmu dan mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Didalam pengertian ini bahwa manajemen memiliki fungsi. Adapun fungsi

tersebut kita kenal dengan POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*) dimana fungsi tersebut berkaitan dengan teori sistem yang meliputi input, proses, dan output. Sehingga suatu organisasi akan melakukan dengan perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan dan pengawasan yang dimiliki ini akan menunjang dalam pencapaian tujuan efektif dan efisien.

Menurut Donovan dan Jackson (dalam Pasolong, 214;82) mendefinisikan manajemen sebagai proses yang dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu, sebagai rangkaian keterampilan dan sebagai serangkaian tugas. Dari batasan yang disebutkan oleh Donovan dan Jackson di atas diinterpretasikan, bahwa manajemen dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu, dan merupakan serangkaian keterampilan dalam mengelola organisasi serta sebagai serangkaian tugas yang melekat pada diri manajer/pemimpin itu sendiri. Selanjutnya dari penjelasan di atas Siswanto (2005;2) memberikan batasan definisi manajemen yaitu manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

The Ling Gie (dalam Mulyono 2016;17) Manajemen sebagai seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia dan alam untuk mencapai tujuan yg telah ditetapkan.

Menurut A.F Stoner dan Charle Wankel (dalam Siswanto 2005;2) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Menurut

Stoner dan Wankel (dalam Siswanto 2005;20) bahwa proses adalah cara sistematis untuk melanjutkan suatu pekerjaan. Dalam batasan manajemen di atas proses nya meliputi:

1. Perencanaan yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan
2. Pengorganisasian yaitu mengoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dibutuhkan.
3. Kepemimpinan yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin
4. Pengendalian yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan jika tidak tercapai dilakukan tindakan perbaikan.

Menurut Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi (dalam Siswanto 2005;2).

Manajemen sebagai fungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat. Sedangkan manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan fenomena – fenomena (gejala – gejala) kejadian- kejadian, keadaan – keadaan, jadi memberikan penjelasan.

Menurut Nawawi (2008;41) beliau memilah–milah pengertian manajemen menjadi beberapa unsur diantaranya adalah:

1. Unsur tujuan organisasi, yang bila di kaitkan dengan pandangan baru adalah keuntungan dan juga manfaat lainnya, melalui dihasilkannya produk dan pelayanan yang berkualitas.
2. Unsur bantuan, yang bila di hubungkan dengan pandangan baru berarti pengikut sertaan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai eksistensi organisasi melalui kerja individual dan kerja di dalam tim (team work)

3. Unsur orang lain, yang jika di kaitkan dengan pandangan baru, dapat diartikan para pekerja dan para menejer dan top menejer, namun jika para menejer dan top menejer dipandang sebagai kesatuan dan di sebut eksekutif, maka orang lain adalah para pekerja yang harus di perlakukan sebagai partner.

Kemudian Darwis dkk(2009;5) yang mengatakan manajemen lebih mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia lainnya, oleh karena itu manajemen sangat di perlukan dalam sebuah organisasi untuk mendayagunakan sumber daya yang ada, maka dengan demikian diperlukan suatu konsep manajemen sumber daya manusia.

Menurut Donovan dan Jackson mendefinisikan manajemen sebagai proses yang dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu, (dalam Pasolong 2007;82) Sebagai rangkaian keterampilan (skil) dan sebagai serangkaian tugas. Setiap fungsi manajemen sangat di perlukan untuk mengatur manajemen pada setiap organisasi hingga tercapai tujuan akhir dari sebuah organisasi. Dari fungsi manajemen tersebut, fungsi penilaian merupakan fungsi akhir mana jemen untuk menentukan berhasil atau tidak nya suatu pekerjaan.

Terry mengatakan secara esensial seorang menejer adalah orang ilmuwan dan seniman. Ia memerlukan sesuatu pengetahuan yang dapat disusun menurut sistem yang memberikan kebenaran – kebenaran pokok yang dapat digunakan dalam mengoperasikan pekerjaannya (dalam Siswanto 2005;10).

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber –sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (dalam 2002;1-2).

Menurut Stoner berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan (dalam Zulkifli 2005:28).

Jadi dapat disimpulkan manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

4. Konsep Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggara Negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengertian lain pembangunan mewujudkan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional.

Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan tersendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya dikonsepsikan usaha pemerintah belaka.

Menurut S. P. Siagian (1987:2) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar yang dilakukan suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa/ nation building.

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industry atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi : 2011:9:-11).

Pembangunan merupakan suatu usaha yang terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk mengukur pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa betung adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenal masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperhatikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Terry (dalam Riyadi, 2005:3)

2. Pengarahan

Pengarahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien, efektif dan ekonomis, (Siagian 2007).

3. Pelaksanaan

merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik pelaksanaannya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. (George Edward III, 1980:1)

4. Pengawasan

Menurut Sondang Siagian (Atmodiwiryo) dalam Satriadi (2011, p.56) pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

5. Konsep Pembangunan Daerah dan Pedesaan

1. Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah perubahan system pemerintahan Indonesia melalui kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal, yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan telah direvisi menjadi undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, dan juga undang-undang nomor 23 Tahun 1999 dan telah direvisi menjadi undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Telah membawa perubahan dalam system pembangunan, dimana pemerintah daerah diberi wewenang yang lebih dalam mengatur daerahnya masing-masing.

Berdasarkan Sjafrizal (2014:14), perubahan yang terjadi pada dasarnya menyangkut dua hal pokok yaitu pertama, pemerintahan daerah diberi 19 kewenangan yang lebih besar dalam melakukan pengelolaan pembangunan (Desentralisasi Pembangunan), kedua, pemerintah diberi sumber keuangan baru dan kewenangan pengelolaan keuangan yang lebih besar (Desentralisasi Fiskal). Pemberian kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dimaksud agar proses pembangunan disesuaikan dengan permasalahan pokok yang dialami. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi

sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal (Arsyad, 1999:108). Sedangkan keberhasilan pembangunan daerah, selain dalam bentuk adil dalam pembangunan nasional, tetapi juga ditujakan dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah, menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

2. Pembangunan Pedesaan

Disadari bahwa pembangunan pedesaan telah banyak dilakukan sejak dahulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subyek pembangunan.

Pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai: (1) upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdayakan masyarakat, dan (2) upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek oleh sebab itu perlu dianalisis/ secara lebih terarah dan serba keterkaitan dengan bidang sektor, dan aspek diluar pedesaan (fisik dan non fisik, ekonomi dan non ekonomi, sosbud dan non spasial).

B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan maka penulis membuat suatu kerangka berpikiran dari penelitian ini sebagai berikut.

Gambar II.1: Kerangka Pikir Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.



C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah penganalisisan dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan konsep operasional sebagai berikut;

- a. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.
- b. Organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sama.
- c. Manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka menerapkan tujuan dan juga sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan managerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.
- d. Pelaksanaan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik pelaksanaannya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. (George Edward III, 1980;1)
- e. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan social ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan tersendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya dikonsepsikan usaha pemerintah belaka.

f. Perencanaan

Perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperhatikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Terry (dalam Riyadi, 2005;3)

g. Pengarahan

Pengarahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien, efektif dan ekonomis, (Siagian 2007).

h. Pelaksanaan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik pelaksanaannya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. (George Edward III, 1980;1)

i. Pengawasan

Menurut Sondang Siagian (Atmodiwiryo) dalam Satriadi (2011, p.56) pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

D. Operasional Variabel

Tabel II.1: Operasional Variabel Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

1	2	3	4	5
Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
Pembangunan adalah sebagian rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang telah ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju kemajuan dalam rangka pembinaan bangsa. (Siagian, 2000;4)	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di desa betung kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan	1.Perencanaan	1. Tepat sasaran atau tidaknya pembangunan. 2. Efesiensi atau tidaknya pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup Terlaksana • Kurang Terlaksana
		2.Pengarahannya	1. Waktu dan pelaksanaan pembangunan. 2. Partisipasi masyarakat dalam (tenaga, pemikiran, dan materi)	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup Terlaksana • Kurang Terlaksana
		3.Pelaksanaan	1. Kendala-kendala dalam pembangunan 2. Pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup Terlaksana • Kurang Terlaksana
		4.Pengawasan	1. Tepat atau tidak hasil dari proses pembanguan 2. Tanggapan masyarakat terhadap proses pembanguan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup Terlaksana • Kurang Terlaksana

Sumber:Modifikasi penulis,2020

E. Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah dan menganalisa data, maka penelitian terhadap pelaksanaan indikator dibagi tiga yaitu: Terlaksana, Cukup terlaksana, Kurang Terlaksana.

Terlaksana : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 75%-100%.

Cukup terlaksana : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 34%-74%.

Kurang terlaksana : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 0%-33%.

Sedangkan untuk pengukuran indicator digunakan kategori sebagai berikut:

1. Transparasi

Terlaksana : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 75%-100%.

Cukup terlaksana : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 34%-74%.

Kurang terlaksana : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 0%-33%.

2. Akuntabilitas

Terlaksana : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 75%-100%

Cukup terlaksana : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 34%-74%

Kurang terlaksana : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 0%-33%.

3. Partisipatif

Terlaksana : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 75%-100%

Cukup terlaksana : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 34%-74%

Kurang terlaksana : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 0%-33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam mendapatkan data dan informasi, penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan tipe *Survey Deskriptif*, yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui di lapangan secara apa adanya mengenai Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Sebagai alat digunakan untuk mendapat informasi adalah dengan cara wawancara, angket (*Kuesioner*), dan observasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang diperoleh dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Menurut sugiyono, (2016:162) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Betung , Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Maksud peneliti melakukan penelitian di tempat ini, menurut peneliti adanya masalah- masalah ditemukannya fenomena Pembangunan yang belum optimal dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga pembangunan tersebut tidak menghasilkan dampak yang baik bagi masyarakat Desa Betung.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel adalah dua bentuk yang berbeda namun didalam hal yg membedakannya adalah, populasi adalah wilayah generalisasi atas objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan olehpeneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2016:90). Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono,2016:91)

Tabel III.1: Populasi dan Sampel Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkakan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Sup Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Desa	1	1	100%
2.	Sekretaris Desa	1	1	100%
3.	Ketua BPD	1	1	100%
4.	Staff Desa	6	6	100%
5.	Kepala Desun	2	2	100%
6.	Masyarakat	450	81	18%
Jumlah		461	92	20%

Keterangan : Data Olahan Penulis Tahun 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel atau teknik sampling adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Adapun penarikan sampel menurut Sugiyono (2004;77) Accidental sampling adalah mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan. Yaitu siapa saja kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel.

Sampel dalam penelitian ini untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Staff Desa, Kepala Dusun penulis menggunakan teknik penarikan sampel sensus adapun penarikan sampel sensus ialah teknik penarikan sampel dengan menarik seluruh anggota populasi untuk dijadikan sampel.

Untuk Masyarakat penulis menggunakan rumus Slovin (dalam menentukan jumlah masyarakat yang akan dijadikan sampel dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot (e)^2}$$

Ket: n= jumlah elemen/anggota sampel

N= jumlah elemen/anggota populasi

e= error level (tingkat kesalahan) (catatan : umumnya digunakan 1% atau 0,01, 5% atau 0,05, dan 10% atau 0,1) (catatan dapat dipilih oleh peneliti)

$$450 / (1 + 450 (10\%)^2)$$

$$450 / (1 + 450 (0,1)^2)$$

$$450 / (1 + 450 (0,01))$$

$$450 / (1 + 4,5)$$

$$450 / 5,5$$

$$= 81$$

E. Jenis Dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menurut jenisnya terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer yaitu data utama yang diperoleh penulis melalui responden penelitian yang telah ditetapkan, melalui kuesioner (angket), wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi pelengkap yang diperoleh dari lembaga, instansi dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini berupa laporan tertulis, buku dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. kuesioner (daftar pertanyaan), yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan tertulis sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian disebarakan kepada responden terpilih untuk di isi sesuai dengan alternatif dan jawaban yang telah disediakan.
2. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dilapangan, dengan melihat objek secara langsung atau pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan.
3. Wawancara, yaitu kegiatan penulis berdialog langsung secara lisan dengan Kepala Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
4. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan data dan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan untuk penelitian ini telah dikumpulkan, data tersebut kemudian dikelompokkan kedalam masing-masing variable, kemudian

dianalisis secara Kuantitatif yang dimana hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian dan informasi pendukung, sehingga dapat diambil kesimpulan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Berikut ini adalah jadwal waktu pelaksanaan penulis tentang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Tabel III.2 :Jadwal Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

No	Jenis kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																											
		Januari				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																								
2	Seminar UP							■																					
3	Revisi UP											■																	
4	Revisi kuisoner																												
5	Rekomendasi survy															■													
6	Survy lapangan															■	■												
7	Analisis data																			■	■								
8	Penyusunan laporan hasil penelitian(skripsi)																			■	■								
9	Konsultasi revisi skripsi																							■	■				
10	Ujian konfrehensi skripsi																											■	
11	Revisi skripsi																											■	
12	Pengadaan skripsi																												■

Sumber:Modivikasi penulis,2020

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut cerita dari tetua tokoh masyarakat, nama Betung diambil dari sejarah zaman dahulu yang diceritakan secara turun temurun nenek moyang masyarakat tentang asal muasal nama Betung. Nama Betung berasal dari salah satu jenis tumbuhan yang berukuran besar, tumbuhan tersebut juga bisa dijadikan sebagai salah satu sumber makanan bagi penduduk yang dari tunasnya yang tumbuh disamping batangnya yang disebut rebung.

B. Sejarah Singkat Desa

Sejarahnya, pada zaman dahulu ada aliran anak sungai yang bermuara kesungai nilo. Posisi anak sungai tersebut tepat pada danau Betung yaitu Pusat Budaya Melayu Petalangan. Yang mana pada waktu itu, aliran anak sungai tersebut belum memiliki nama. Pada waktu itu ada seorang kepala keluarga yang bernama datuk Botung yang Merupakan penghulu kampung tersebut, beliau tinggal disuatu pedusunan yang mana pada waktu itu bukanlah suatu desa atau 41 kampung, tapi hanya seunit dusun kecil yang didiami oleh beberapa keluarga yang terletak dipinggir sungai nilo/pada seunit aliran anak sungai.

Beliau membuat seunit tepian (perigi) ditepi aliran anak sungai tersebut ada dipinggir tepian tersebut ditanamlah sebatang bulu/bambu besar yang dinamakan bulu/bambu Botung dan sampai sekarang nama aliran anak sungai tersebut diberi nama sungai Botung. Dan pada tahun 1953 melekatlah nama dusun

tersebut menjadi Desa Betung dengan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Pada perkembangannya, sebelum betung resmi menjadi seunit desa, desa betung memiliki nama-nama wilayah bagian atau dusun atau kampung kecil yang didiami beberapa penduduk seperti Tanjung Sialang, Bukit Raya, Sialang Kawan, Simpang Tiga dan masih banyak lagi nama-nama kampung yang berada di desa betung. Namun seiring dengan perkembangan zaman sesuai dengan sistem pemerintahan, Betung resmi menjadi seunit desa yaitu Desa Betung.

Desa Betung berjarak kurang lebih 13 Km dari ibu kota Kec. Pangkalan Kuras dan 53 Km dari ibu Kota Kabupaten Pelalawan dengan luas wilayah + 5.000 Ha. Bentangan alamnya adalah berbukit-bukit dan rawa-rawa. Dilihatdari persentase bentangan alam sebagian wilayah desa betung didominasi oleh perkebunan dan hutan selebihnyaadalah persawahan dan pemukiman penduduk serta perkarangan dengan suhu rata-rata harian 26 s/d 34 Oc. secara geografis, desa betung berbatasan dengan, Utara berbatas dengan desa Batang Kulim, Timut berbatas dengan Desa Talau dan Kesuma, Selatan berbatas dengan Desa Kesuma, Barat berbatas dengan Desa Kesuma dan Terantang Manuk.

Dilihat dari segi perekonomian, desa betung merupakan salah satu desa yang berada di kec. Pangkalan Kuras, sebagai sumber ketahanan panganseiring dengan program pemerintah yaitu Operasi Pangan Riau Mamur (OPRM) yang telah dicadangkan pada tahun 2010. Dengan pembukaan lahan sawah seluas 108 Ha produktif yang sudah digarap sejak tahun 2006. Dengan hasil produksi rata-rata 4 ton gabah/ha. Sebagai wujud dari keinginan pemerintah Desa Betung dan

masyarakat, maka pada tahun 2010 telah dilaksanakan panen raya yang dibuka oleh bapak bupati pelalawan.

Selain hal tersebut yang menjadi faktor utama sebagai penunjang peningkatan perekonomian masyarakat desa betung adalah desa yang memiliki wilayah perkebunan kelapa sawit dan karet yang cukup luas, berdasarkan bentangan alamnya desa didominasi oleh perkebunan. Inilah salah satu faktor dalam menunjang sector perekonomian masyarakat. Sejak tahun 2005 masyarakat desa betung sudah mulai menjalin mitra dengan PT. Musim Mas dalam pembangunan pola KKPA seluas 354 Ha yang dibagi dalam 2 taraf yaitu 164 taraf pertama dan 190 Ha taraf kedua yang telah dikonversikan kepada masyarakat dengan penghasilan rata-rata perbulan adalah 3,5 juta rupiah (netto) Bulan. Selain itu masyarakat juga telah menjalin mitra dengan PT. Surya Bratasena Plantation dengan pembangunan pola KKPA juga seluas 350 Ha. Pada tahun 2009.

C. Visi Desa Betung

Visi desa Betung adalah Terwujudnya Desa Betung yang sejahtera, mandiri dan berbudaya melalui pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan public.

D. Misi Desa Betung

Adapun misi dari Desa Betung adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali pemerintahan desa untuk masyarakat Desa Betung dengan membuka ruang pengaduan/keluhan setiap hari pada jam kerja tertentu untuk menampung segala permasalahan masyarakat dan

memberikan solusi dan tindak lanjut sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.

2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara merata, cepat dan tanggap.
3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan melalui paparan perkembangan program pembangunan dan realisasinya secara berkala diruang umum.
4. Pembangunan infrastruktur yang merata dan skala prioritas dengan melibatkan masyarakat melalui adat karya dan gotong royong.
5. Meningkatkan peran aktif perusahaan dan dunia usaha serta peranan wanita yang ada di desa Betung untuk andil dalam program kesejahteraan masyarakat desa Betung.
6. Memajukan bidang olahraga untuk pemuda dengan menyelenggarakan turnamen olahraga setiap tahun dan berkelanjutan.
7. Mendayagunakan SDM (sumber daya manusia) yang ada di desa Betung untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam mengawasi pembangunan anggaran dana desa.
8. Memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.
9. Membuat event-event wisata di danau desa Betung pusat budaya petalangan dengan melibatkan warga dengan tujuan memperkenalkan objek wisata ke masyarakat luar.

10. Lebih memperhatikan akses jalan dari dan keluar lokasi budidaya pertanian serta mendukung memfasilitasi program Dinas Pertanian Kabupaten Pelalawan untuk kemajuan pertanian yang unggul dan tangguh di Desa Betung.

11. Bekerjasama dan melibatkan Pemangku Adat yang ada di Desa Betung dalam menjalankan visi-misi.

E. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Betung

Gambar IV. 1 :Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Betung

Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan



**Tabel IV. 1 : Data Perangkat Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras
Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan**

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	Darman, SE	Kepala Desa	S.1
2.	Agus Salim	Kaur. TU dan Umum	SLTA
3.	Toyo, S.Ud	Staff Pemerintahan	S.1
4.	Desi Ismiyanti	Kasi. Pemerintahan	S.1
5.	Darmawan S,Sos	Kaur. Perencanaan	S.1
6.	Eliana, SE	Kasi. Kesos	S.1
7.	Sunarto	Kaur. Keuangan	S.1
8.	Linda Salindri	Staff. Keuangan	S.1
9.	Wirman	Kepala Dusun I	S.1
10.	Radiansyah	Kepala Dusun II	SMA

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian ini yang sangat berperan penting adalah responden, karena dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, jadi data-data yang di dapat dalam penelitian ini bersumber dari pegawai Dinas Desa Betung, dan Masyarakat sekitar. Penulis mendapatkan informasi melalui penyebaran kuesioner yaitu pegawai Desa Betung berjumlah 6 orang, dan masyarakat yang ditemui berjumlah 81 orang. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Betung.

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia dan pendidikan. Identitas responden ini diperlukan untuk mempermudah penulis dalam mengolah data yang disajikan dalam bentuk tabel. Selain itu penulis juga menilai bahwa pentingnya untuk mengetahui usia dan pendidikan responden, karena hal ini akan dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap penelitian tersebut. Berikut ini merupakan paparan lebih jelas mengenai identitas respondend dalam penelitian ini:

1. Identitas Respondend Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian tentang Pelaksanaan Infrastruktur Pembangunan Desa Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dan dengan cara penyebaran kuesioner maka identitas responden adalah sebagai berikut:

Tabel V.1 : Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin Pegawai Kantor Desa Betung

No	Identitas Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	3	50%
2	Perempuan	3	50%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan 2021

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden pegawai kantor Desa Betung yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan adalah dominanya adalah Laki-Laki yang berjumlah 3 orang dengan persentase 50% sedangkan untuk pegawai yang berjenis kelamin Perempuan berjumlah 3 orang dengan persentase 50% dan total keseluruhan pegawai kantor Desa Betung adalah sebanyak 6 orang yang dijadikan sebagai sampel.

Tabel V.2 : Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin Masyarakat Desa Betung

No	Identitas Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	31	38%
2	Perempuan	50	62%
	Jumlah	81 orang	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan 2021

Dari table V.2 diatas dapat dilihat bahwa responden masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Betung Keamatan Pangkalan Kuras

Kabupaten Pelalawan adalah dominannya laki-laki dengan jumlah rata-rata sebanyak 31 orang dengan persentase 38% sedangkan untuk jumlah perempuan dengan rata-rata sebanyak 50 orang dengan persentase 62%. Jadi, total masyarakat yang dijadikan sampel sebanyak 81 orang dan ini merupakan masyarakat yang dapat penulis temui di Desa Betung.

2. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Identitas kedua yang penulis peroleh dari hasil lapangan adalah identitas responden mengenai usia. Usia merupakan salah satu penentu dalam pelaksanaan penelitian ini, karena semakin matang usia seseorang maka cara berpikirnya tentu sudah berbeda dengan seseorang yang belum memiliki usia yang matang. Dari hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, serta dengan cara penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan usia dapat dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.3 : Identitas Responden Menurut Usia Pegawai Kantor Desa Betung

No	Identitas Responden	Jumlah	Persentase%
1	20-30 Tahun	6	100%
2	31-40 Tahun	0	0
3	41-50 Tahun	0	0
4	>50 Tahun	0	0
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan 2021

Dari tabel V.III diatas dinyatakan bahwa responden dari Pegawai Kantor Desa Betung, responden yang paling banyak memiliki usia 20-30 tahun yaitu sebanyak 6 orang dengan persentase 100%, dan jumlah yang memiliki usia 31-40 tahun sebanyak 0 orang dengan persentase 0% dan terakhir yang memiliki usia 41-

50 tahun sebanyak 0 orang dengan persentase 0%, jadi total keseluruhan dari jumlah Staf Pegawai Kantor Desa Betung berdasarkan usia yang dijadikan sampel adalah sebanyak 6 orang

Tabel V.4 : Identitas Responden Menurut Usia Masyarakat Desa Betung

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	15-20 Tahun	8	10%
2	21-25 Tahun	15	18%
3	26-30 Tahun	20	25%
4	31-35 Tahun	30	37%
5	36-40 Tahun	8	10%
6	>40 Tahun	0%	0%
	Jumlah	81	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan 2021

Dari tabel V.4 diatas dinyatakan bahwa responden dari masyarakat Desa Betung yang dominan pada usia 31-35 tahun sebanyak 30 orang dengan persentase 37%. Sedangkan untuk masyarakat yang berusia 26-30 tahun sebanyak 20 orang dengan persentase 25%, Untuk masyarakat berusia 21-25 tahun sebanyak 15 orang dengan persentase 18% dan untuk masyarakat yang berusia 36-40 tahun sebanyak 8 orang dengan persentase 10% yang terakhir masyarakat berusia 15-20 tahun sebanyak 8 orang dengan persentase 10%.

3. Identitas Respondend Berdasarkan Pendidikan

Dan identitas ketiga yang penulis dapatkan dari hasil di lapangan berdasarkan pendidikan. Pendidikan sangat mempengaruhi cara sudut pandang seseorang, baik itu dalam memberikan pendapat maupun dalam melakukan suatu tindakan. Dari hasil penelitian tentang Pelaksanaan Infrastruktur Pembangunan Desa Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, serta dengan

penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan menurut jenjang pendidikan adalah tabel berikut ini:

Tabel V.5 : Identitas Respondend Menurut Jenjang Pendidikan Pegawai Kantor Desa Betung

No.	Identitas Respondend	Jumlah	Presentase %
1.	SD	0	0%
2.	SMP	0	0%
3.	SMA/SMK	0	0%
4.	Diploma I/II/III	0	0%
5.	Sarjana S1	6	100%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2021

Dari tabel V.5 diatas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden pegawai Kantor Desa Betung yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian dominannya adalah tamatan S1 sebanyak 6 orang dengan persentase 100% sedangkan untuk tamatan Diploma I/II/III sebanyak 0 orang dengan persentase 0% dan yang terakhir tamatan SMA sebanyak 0 orang dengan jumlah persentasi 0%. Jadi, total keseluruhan pegawai Kantor Desa Betung yang dijadikan sampel sebanyak 6 orang.

Tabel V.6 : Identitas Rensponden Menurut Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Betung.

No.	Identitas Respondend	Jumlah	Presentase %
1.	SD	0	0
2.	SMP	15	18%

3.	SMA/SMK	45	56%
4.	Diploma I/II/III	5	6%
5.	Sarjana S1/S2	16	20%
	Jumlah	81	100%

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2021

Dari tabel V.6 di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan responden masyarakat Desa Betung adalah dominannya pada pendidikan tingkat SMA sebanyak 45 orang dengan rata-rata 56%, sedangkan untuk pendidikan SMP sebanyak 15 orang dengan persentase 18% dan untuk pendidikan Diploma I/II/III sebanyak 5 orang dengan persentasi 6%. Sedangkan untuk pendidikan SI berjumlah 16 orang dengan persentasi 20%.

B. Hasil dan Pembahasan Dari Indikator Variabel Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus diberikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi (dalam Harbani Pasolong 2013). Ada beberapa indikator yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan Fred .R.David (dalam Fred R David 2010), dan indikator-indikator yang penulis gunakan dalam mencari hasil penelitian ini adalah: Perencanaan, Pengarahan, Pelaksanaan dan Pengawasan. Dan didalam setiap indikator akan dilengkapi dengan sub indicator yang berguna untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator maka penulis akan

membahas tentang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa dalam bentuk tabel.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (Tujuan) serta menentukan berbagai tahap yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Didalam indikator ini ada 2 item penilaian yang dilakukan yaitu, pertama tepat sasaran atau tidaknya pembangunan, kedua efisiensi atau tidaknya pembangunan. Dengan adanya dua item penilaian ini maka dapat kita mengetahui seberapa efektif nya Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Betung.

Tabel V.7 :Tanggapan Responden Pegawai Kantor Desa Betung Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten pelalawan

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Tepat saasaran atau tidaknya pembangunan.	0 (0%)	6 (100%)	0 (0%)	6 (100%)
2.	Efisiensi atau tidaknya pembangunan.	0 (0%)	6 (100%)	0 (0%)	6 (100%)
Jumlah		0	12	0	12
Rata-rata		0	6	0	6
Persentase		0%	100%	0%	100%

Sumber Data: Olahan Penulis Tahun 2021

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.7 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh pegawai adalah 100% “Cukup Terlaksana”, dari tanggapan diatas dapat dilihat bahwa untuk penilaian dalam indikator perencanaan bahwa pegawai Kantor Desa Betung telah melakukan 100% Cukup Terlaksana kegiatan

ataupun program serta memberikan pelatihan untuk dapat membantu berjalannya kegiatan ataupun program yang dilaksanakan.

Tabel V.8 :Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Tepat sasaran atau tidaknya pembangunan	40 (49%)	30 (37%)	11 (14%)	81 (100%)
2.	Efesiensi atau tidaknya pembangunan	15 (18%)	47 (58%)	19 (24%)	81 (100%)
Jumlah		55	77	30	162
Rata-rata		28	38	15	81
Persentase		35%	47%	18%	100%

Sumber: Data Olahan Penulis 2021

Berdasarkan tabel V.8 diatas masyarakat yang memeberikan tanggapan dominan berada pada kategori “Cukup Terlaksana” rata-rata sebanyak 38 orang dengan persentase 47%. Hal ini terjadi dikarenakan adanya masyarakat yang merasakan pembangunan yang tidak merata oleh pemerintahan Desa Betung. Sedangkan masyarakat yang menjawab dengan kategori “Terlaksana” rata-rata 28 orang dengan persentase 35% dan kategori “Kurang Terlaksana” rata-rata 15 orang dengan persentase 18%.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan diatas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kepala Desa Betung, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan jawaban yang telah didapatkan. Wawancara yang penulis lakukan di Kantor Desa Betung dengan

Bapak Darman, S.E sebagai Kepala Desa Betung, adapun hasil wawancara yang penulis dapat dari Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut :

“Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Betung dalam menyerap Anggaran dari APBN khususnya melalui bidang pembangunan infrastruktur adalah membentuk tim penyusun mempersiapkan perencanaan pembangunan infrastruktur mulai dari musyawarah perencanaan tingkat Dusun dalam rangka mengali usulan masyarakat sampai musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (MusRenBangDes) dalam rangka menginventarisir semua usulan masyarakat yang selanjutnya akan diambil skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan”.

Selanjutnya, penulis akan menyajikan indicator kedua yaitu Pengarahan, adapun hasil yang penulis dapatkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

2. Pengarahan

Pengarahan adalah proses menentukan kegiatan-kegiatan organisasi ke arah yang tepat yang dapat mengantarkan kepada tercapainya suatu tujuan. Dimana pada indikator ini dapat kita lihat apakah pemerintah Desa Betung telah melaksanakan program-program ataupun kegiatan pembangunan.

Didalam indikator ini ada 2 item penilaian yang dilakukan yaitu, Pertama, apakah waktu pelaksanaan pembangunan terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kedua, apakah dalam pembangunan yang dilakukan ada partisipasi masyarakat dalam (tenaga, pemikiran dan material) untuk terlaksananya pembangunan.

Tabel V.9: Tanggapan Responden Pegawai Kantor Desa Betung Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksan a	Kurang Terlaksan a	
1.	Waktu dan pelaksanaan	0	6	0	6

	pembangunan	(0%)	(100%)	(0%)	(100%)
2.	Partisipasi masyarakat	0 (0%)	(0%)	6 (100%)	6 (100%)
	Jumlah	0	6	6	12
	Rata-rata	0	3	3	6
	Persentase	0%	50%	50%	100%

Sumber Data: Olahan Penulis Tahun 2021

Berdasarkan pada tabel V.9, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh pegawai Kantor Desa Betung “Terlaksana” rata-rata sebanyak 0 orang dengan persentase 0%, untuk kategori “Cukup erlaksana” rata-rata sebanyak 3 orang dengan persentase 50%, sedangkan untuk kategori “ Kurang Terlaksana” rata-rata sebanyak 3 orang dengan persentase 50%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa tanggapan ataupun penilaian dominan yang diberikan oleh pegawai Kantor Desa Betung berada pada kategori “Cukup Terlaksana”, hal ini dikarenakan bahwa pihak pegawai Kantor Desa Betung sudah Melaksanakan waktu dan pelaksanaan pembangunan terhadap Desa Betung.

Tabel V.10 :Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksan a	Cukup Terlaksan a	Kurang Terlaksan a	
1.	Waktu dan pelaksanaan pembangunan	27 (33%)	36 (45%)	18 (22%)	81 (100%)
2.	Partisipasi masyarakat	24 (20%)	44 (54%)	13 (16%)	81 (100%)
	Jumlah	51	80	31	162
	Rata-rata	25	40	16	81
	Persentase	31%	49%	20%	100%

Sumber Data: Olahan Penulis Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.10 dapat dilihat bahwa masyarakat yang memberikan tanggapan dengan kategori “Cukup Terlaksana” rata-rata 40 orang dengan persentase 49%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai bahwa tidak adanya dari pihak Pemerintahan Desa Betung sosialisasi dengan masyarakat tentang pembangunan. Sedangkan untuk kategori “Terlaksana” rata-rata 25 orang dengan persentase 31% dan kategori “Kurang Terlaksana” rata-rata 16 orang dengan persentase 20%.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan diatas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kepala Desa Betung, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan jawaban yang telah didapatkan. Wawancara yang penulis lakukan di Kantor Desa Betung dengan Bapak Darman, S,E sebagai Kepala Desa Betung, adapun hasil wawancara yang penulis dapat dari Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut :

“Sosialisasi tentang program pembangunan infrastruktur di Desa Betung kepada masyarakat telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa, Sekretaris Desa dan juga Aparat Desa dalam setiap kesempatan. Peran Pemerintah Desa lebih bersifat memfasilitasi, sedangkan pada tingkat masyarakat yang dibutuhkan adalah partisipasi. Integritas organisasi dalam pembangunan infrastruktur desa, komunikasi masyarakat dan aparat pemerintahan desa telah disampaikan melalui Musrenbang dalam Musrenbang tersebut akan diketahui pembangunan apa saja yang akan dipentingkan atau didahulukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan diturunkan dalam bentuk suatu program atau proyek.

Didalam indikator ini ada 2 item penilaian yang dilakukan yaitu, Pertama, dalam melaksanakan pembagunan apakah terlaksana dengan baik atau terdapatnya kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Kedua, dalam pelaksanaan pembangunan apakah terlaksana dengan baik pembangunan yang dilakukan pemerintah desa bagi masyarakat.

Tabel V.11 : Tanggapan Responden Pegawai Kantor Desa Betung Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Kendala dalam pembangunan	6 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	6 (100%)
2.	Pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat	0 (0%)	6 (100%)	0 (0%)	6 (100%)
Jumlah		6	6	0	12
Rata-rata		3	3		6
Persentase		50%	50%	0%	100%

Sumber Data: Olahan Penulis Tahun 2021

Berdasarkan table V.11 diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai dominan memberikan tanggapan dengan kategori “Terlaksana” rata-rata sebanyak 6 orang dengan persentase 50%. Sedangkan unuk kategori “Cukup Terlaksana” rata-rata sebanyak 6 orang dengan persentase 50% dan kategori “Kurang Terlaksana” rata-rata sebanyak 0 orang dengan persentase 0%. Dalam hal ini, pihak pegawai Kantor Desa Betung tidak mengalami kendala dalam melaksanakan pembangunan namun, tidak 100% dikarenakan masih adanya pembangunan yang belum merata.

Tabel V.12 : Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Inftrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Kendala dalam pembangunan	25 (30%)	36 (45%)	20 (25%)	81 (100%)
2.	Pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat	20 (25%)	26 (32%)	35 (43%)	81 (100%)
Jumlah		45	62	55	162
Rata-rata		22	31	28	81
Persentase		27%	38%	35%	100%

Sumber Data: Olahan Penulis Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.12 dapat dilihat bahwa masyarakat yang memberikan tanggapan dominan berada pada kategori “Cukup Terlaksana” rata-rata 31 orang dengan persentase 38%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai bahwa belum seluruh masyarakat merasakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah desa. Sedangkan masyarakat yang memberikan tanggapan untuk kategori “Kurang Terlaksana” rata-rata 28 orang dengan persentase 35% dan kategori “Terlaksana” rata-rata 22 orang dengan persentase 27%.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan diatas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kepala Desa Betung, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan jawaban yang telah didapatkan. Wawancara yang penulis lakukan di Kantor Desa Betung dengan Bapak Darman, S.E sebagai Kepala Desa Betung, adapun hasil wawancara yang penulis dapat dari Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut :

“Dalam melakukan pelaksanaan pembangunan ada saja kendala yang dihadapi Desa Betung dalam penyerapan anggaran melalui bidang infrastruktur adalah sumber daya manusia perangkat Desa yang masih rendah dan masih kurang pengetahuan masyarakat sendiri dalam hal menerima informasi tentang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sehingga berakibat masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat”.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Didalam indikator ini ada 2 item penilaian yang dilakukan yaitu, Pertama, apakah evaluasi terlaksana dengan baik terhadap kinerja pemerintah desa dalam melakukan pembangunan. Kedua, apakah fungsi pengawasan terlaksana dengan baik.

Tabel V.13 : Tanggapan Responden Pegawai Kantor Desa Betung Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Tepat atau tidak hasil dari proses pembangunan	6 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	6 (100%)
2.	Tanggapan masyarakat terhadap proses pembangunan	0 (0%)	6 (100%)	0 (0%)	6 (100%)
Jumlah		6	6	0	12
Rata-rata		3	3		6
Persentase		50%	50%	0%	100%

Sumber Data: Olahan Penulis Tahun 2021

Berdasarkan table V.13 diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai dominan memberikan tanggapan dengan kategori “Terlaksana” rata-rata sebanyak 6 orang

dengan persentase 50%. Sedangkan unuk kategori “Cukup Terlaksana” rata-rata sebanyak 6 orang dengan persentase 50% dan kategori “Kurang Terlaksana” rata-rata sebanyak 0 orang dengan persentase 0%. Dalam hal ini, pihak pegawai Kantor Desa Betung tidak mengalami kendala dalam melaksanakan pembangunan namun, tidak 100% dikarenakan masih adanya pembangunan yang belum merata.

Tabel V.14 : Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Tepat atau tidaknya hasil dari proses pembangunan	26 (32%)	38 (47%)	17 (21%)	81 (100%)
2.	Tanggapan masyarakat dari proses pembangunan	32 (39%)	37 (46%)	12 (15%)	81 (100%)
Jumlah		58	75	29	162
Rata-rata		29	37	15	81
Persentase		36%	46%	18%	100%

Sumber Data: Olahan Penulis Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.14 dapat dilihat bahwa masyarakat yang memberikan tanggapan dominan berada pada kategori “Cukup Terlaksana” rata-rata 37 orang dengan persentase 46%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai bahwa tidak semua masyarakat mengetahui program pembangunan desa. Sedangkan masyarakat yang memberikan tanggapan untuk kategori “Terlaksana” rata-rata 29 orang dengan persentase 36% dan kategori “Kurang Terlaksana” rata-rata 15 orang dengan persentase 18%.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan diatas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kepala Desa Betung, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga

perbandingan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan jawaban yang telah didapatkan. Wawancara yang penulis lakukan di Kantor Desa Betung dengan Bapak Darman, S.E sebagai Kepala Desa Betung, adapun hasil wawancara yang penulis dapat dari Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut :

“Langkah-langkah BPD selaku bagian dari Pemerintahan Desa Betung selalu bekerja sama dalam pengawasan untuk mendorong Pemerintah Desa dalam mengali aspirasi masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur melalui musyawarah yang benar di buka seluas-luasnya untuk akses masyarakat. Dalam upaya penyerapan anggaran dari APBN bidang pembangunan infrastruktur Desa dengan cara memberikan masukan atau usulan dalam perumusan perencanaan pembangunan infrastruktur Desasehingga tercover dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)”.

Tabel V.15 : Rekapitulasi Pelaksanaan Pembangunan Inftrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Perencanaan	28 (33%)	44 (50%)	15 (17%)	87 (100%)
2.	Pengarahan	25 (29%)	43 (49%)	19 (22%)	87 (100%)
3.	Pelaksanaan	25 (29%)	34 (39%)	28 (32%)	87 (100%)
4.	Pengawasan	32 (37%)	40 (46%)	15 (17%)	87 (100%)
Jumlah		110	161	77	348
Rata-rata		28	40	19	87
Persentase		32%	46%	22%	100%
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber Data: Olahan Penulis Tahun 2021

B. Faktor-Faktor Penghambat Yang Dialami Oleh Pemerintahan Desa Betung Dalam Melaksanakan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan pelaksanaan dilapangan, pada saat melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Betung mendapat beberapa faktor penghambat yang dialami oleh pihak Pemerintahan Desa Betung , yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya keterbukaan Pemerintahan Desa Betung terhadap masyarakat setempat, singga banyak dari masyarakat yang tidak tahu program-program apa saja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Betung, masih kurangnya sumber daya manusia perangkat Desa yang masih rendah dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat sendiri dalam menerima informasi tentang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sehingga berakibat masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.
2. Dengan pemerintahan yang transparan, maka anggaran yang diberikan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan dengan benar dan tidak menjadi kecurugaan antara warga terhadap pemerinntah desa. Warga desa perlu mengetahui bagaimana kinerja perangkat desa dengan kata lain transparan dalam hal anggaran untuk pembangunan desa yang lebih maju. Struktur organisasi pun harus dibuat dengan benar sehingga semua perangkat desa menjalankan tugas yang telah ditetapkan.
3. Konsisten dalam aturan, tidak merubah-ubah. Maksudnya dalam menetapkan suatu gagasan atau keputusan tidak berubah-ubah. Dengan memiliki sifat yang konsisten diyakini bahwa segala pekerjaan yang dilakukan akan membuahkan hasil yang maksimal. Konsisten dalam aturan

ini dapat dilihat dari penerapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tidak berubah dari rencana atau perencanaan awal yang telah disepakati pada saat musyawarah desa bersama perangkat desa, Dusun, RT RW, Pemuka Masyarakat dan BPD.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan peneliti mengenai Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang menggunakan 4 indikator; Perencanaan, Pengarahan, Pelaksanaan dan Pengawasan. Maka peneliti mengambil kesimpulan dan saran untuk bahan acuan dari hasil penelitian yang sekiranya dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca skripsi ini terutama untuk masukan Pemerintahan Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan.

A. Kesimpulan

1. Untuk indikator Perencanaan adalah dalam perencanaan pembangunan yang ditemukan di Desa Betung yaitu bahwa Pemerintah Desa kurang mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan, sehingga banyak masyarakat yang kurang mengetahui program-program pembangunan di Desa tersebut sehingga responden dari Pemerintahan desa dan Masyarakat dapat disimpulkan “Cukup Baik”.
2. Untuk indikator Pengarahan berdasarkan hasil responden dan wawancara terhadap aparat Desa dan masyarakat. Pengarahan yang diberikan oleh aparat desa di dalam pembangunan desa terlaksana dengan cukup baik, sedangkan dari masyarakat cukup terlaksana. Mengapa demikian berdasarkan observasi dilapangan masih kurangnya pengarahannya yang diberikan oleh pemerintahan desa terhadap pembangunan yang direncanakan dan begitu juga responden

yang diberikan oleh masyarakat setempat bahwasanya masyarakat tidak melihat aparat desa memberi arahan secara langsung terhadap pekerja pembangunan melainkan ketika sudah selesai pembangunan barulah aparat desa turun kelapangan.

3. Untuk indikator Pelaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan desa Betung, belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat desa, hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat yang belum merasakan pembangunan yang dilakkukan oleh pemerintahan Desa.
4. Untuk indikator Pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan yang diawasi langsung oleh Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa sudah terlaksana. Namun masih terdapat beberapa pelaksanaannya yang masih belum optimal sesuai dengan proses pengawasan, hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdapat hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa diantaranya kurangnya sumber daya manusia anggota BPD yang masih rendah, komunikasi yang kurang optimal dengan Pemerintahan Desa.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang ingin peneliti buat dari keseluruhan hasil yang telah didapat:

1. Demi meningkatkan pembangunan infrastruktur desa seharusnya pemerintah desa lebih mengajak masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam

pembangunan infrastruktur desa, supaya pemerintah desa lebih tau apa saja yang seharusnya dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Mekanisme perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan sebaiknya dilakukan dengan teliti dan harus tau apa yang lebih dibutuhkan dan diinginkan langsung oleh masyarakat.
3. Banyaknya kerusakan jalan yang seharusnya diperhatikan lebih pemerintah desa saat ini. Untuk itu, pemerintah desa perlu segera melakukan *engineering audit* terhadap penyelenggaraan jalan. Kerusakan struktur jalan disebabkan oleh beberapa factor penting, yaitu: kendaraan berat dengan muatan lebih, kondisi drainase permukaan jalan dan mutu pelaksanaan konstruksi jalan.

Untuk peneliti selanjutnya yang akan mengangkat topic yang sama, sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisamita, Raharjo, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Dwipayana, AAGN. Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta; IRI Press
- George.R Terry 2006. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta Bumi Aksara
- Hamidi, Rusli. 2007. *Otonomi Daerah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2004. *Organisasi dan Motifasi* .Jakarta: Grasindo
- Hamim Sufian . 2005. *Administrasi Organisasi, dan Manajemen* . Pekanbaru :UIR Press
- Iskandar .2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*.Jakarta:Guang Persada Press.
- Kencana, Inu syafiie, 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, PT Raneka Aditia
- Karyanto. 2006. *Dasar-Dasar Teori dan Konsep*. Yokyakarta: Andi offset
- Martoyo, Susilo. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yokyakarta. Bppe
- Mulyono. 2016. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Jogjakarta :AR-Ruzz Media
- Narbuko Cholid & Abu Achmadi.2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari.2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Narwoko dwi, Suyanto Bagoeng. 2015. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*,
Jakarta:Kencana

Pasolong,Harbani,2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung:Alfabeta

Syafiie,Inu Kencana,2003. *Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta:Bumi Aksara

Siagian P.Sondang.2003. *Filsafat Administrasi Edisi revisi* .Jakarta :Bumi Aksara

Siagian,P.Sondang.2007. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*.
Jakarta: CV Haji Masangung

Siswanto,HB.2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta :Bumi Aksara

Soekanto,Sorjono.2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta:Rajawali Perss

Sugiono,2009. *Metode Penelitian Administrasi*,Bandung:Alfabet

Suhardono,2011. *Pengantar dan Management*.Jakarta:Gunung Agung

Suwatno,Donni J.Priansa,2014. *Manajemen SDM* .Bandung :Alfabet

Syafri Wirman,2012. *Studi Administrasi Publik*.Jatinegoro:Erlangga

Thoha.Miftah.2011.*Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*.
Jakarta:Kencana

Usman,usaini.2009. *Metodologi Penelitian Sosial*.Jakarta:Bumi Aksara

Zulkifli & Nurmasari ,2015.*Pengantar Manajemen* .Pekanbaru:Marpoyan Tujuh
Publihing

Zulkifli,2009. *Fungsi-Fungsi manajemen*.Pekanbaru:UIR Pers

Zulkifli,2005.*Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Pekanbaru:
UIR Pers

Yussa H.A Tarmizi & Hendry Andry.2015. *Perilaku Etika Administrasi Publik*.
Pekanbaru:Marpoyan Tujuh Publihing



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: 3748/A_UIR/FS-5/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Robi Jupri Adi
Npm : 167110424
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Betung
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Persentase Plagiasi : 28 % (70 Halaman)

Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6 Oktober 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230